

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan, berdasarkan data dari Departemen Dalam Negeri tahun 2014 terdapat 17.504 Pulau yang terdapat di Indonesia diantaranya sebanyak 9.634 Pulau belum memiliki nama, sedangkan terdapat 7.870 Pulau yang telah memiliki nama. Kekayaan inilah yang seharusnya dapat di kelola dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya. (Kementerian Kelautan dan Perikanan :2014).

Menurut Soegiarto.A(1976)Pesisir merupakan Daerah pertemuan antara darat dan laut.Kearah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin.Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami Wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir (Satria, 2004).Secara teoritis, masyarakat pesisir didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumberdaya Wilayah pesisir dan lautan.Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan. Namun demikian, secara luas

masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di Wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan (Famif. 2010).

Berikut adalah Data Penangkapan Perikanan di Pulau Madura

Tabel 1.1

**Data Penangkapan Perikanan di Madura Tahun
2014**

No	Kabupaten	Jumlah Perikanan (Ton)
1	Sampang	15,617
2	Bangkalan	23,485
3	Pamekasan	20,283
4	Sumenep	40,200

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2015

Mengamati dari data di atas terlihat bahwa Kabupaten Sampang menduduki posisi paling rendah dari tiga kabupaten lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari jumlah penangkapan ikan, hal ini dapat mempengaruhi terhadap pendapatan masyarakat nelayan yang pada akhirnya berimplikasi pada kemiskinan di Kabupaten Sampang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Kabupaten Sampang memiliki empat belas kecamatan. Namun, tidak semua kecamatan berada pada dataran rendah, artinya, tidak semua Kecamatan berada di pesisir pantai. Hanya terdapat 7 Kecamatan yang berada di peisisir pantai, sehingga

masyarakat yang berada di pesisir pantai mayoritas bermata pencaharian nelayan.

Tabel 1.2
Data Perikanan Perkecamatan di Kab. Sampang
Tahun 2015

NO	Kecamatan	Perikanan/ton
1	Sampang	4.800
2	Camplong	2.953
3	Sreseh	2.190
4	Banyuates	2.122
5	Sokobanah	1.871
6	Ketapang	1.393
7	Pangarengan	288

Sumber ;*Bps Kabupaten Sampang, 2014*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Tujuh Kecamatan di Kabupaten Sampang yang berada di daerah dekat pantai diantaranya, Kecamatan Sreseh, Pengarengan, Sampang, Camplong, Banyuates, Ketapang, Sokobanah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, hasil perikanan terbesar terdapat pada Kecamatan Sampang sebesar 4.800 ton hasil tangkapan, sedangkan hasil tangkapan terendah terdapat di Kecamatan Pangarengan sebesar 288 ton.

Kecamatan Pengarengan berada di posisi terendah di karenakan jarak pemukiman warga dengan bibir pantai relatif jauh hal ini dikarenakan terdapat daratan yang luas yang memisahkan antara rumah pemukiman warga dengan bibir pantai. Daratan luas yang tidak dibangun menjadi pemukiman hal ini di manfaatkan oleh warga untuk menjadi lahan usaha tambak udang dan

ikan. Sebagian besar juga dimanfaatkan oleh perusahaan garam untuk menghasilkan produksi garam terbesar di Kabupaten Sampang khususnya di pulau Madura pada umumnya.

Mata pencaharian masyarakat kecamatan Pengarengan pada umumnya adalah petani tambak musiman. Pada musim kemarau biasanya masyarakat Pengarengan yang berprofesi sebagai petani tambak musiman biasanya mereka bekerja dengan petani garam hingga siap di kirim keluar daerah. Sedangkan ketika musim penghujan para petani tambak musiman mereka akan bekerja sebagai pembudidaya ikan dan udang windu, sehingga sangat sedikit masyarakat pengarengan yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Sebagai seorang nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal maka perlu adanya fasilitas yang sangat mendukung dalam proses penangkapan ikan sedangkan pada masyarakat Pengarengan fasilitas pendukung untuk menangkap ikan sangat minim, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan dan minat masyarakat Pengarengan untuk melaut. Hal ini justru berbeda dengan kecamatan Ketapang, meskipun pemukiman warga berada pesisir pantai dan mayoritas mata pencahariannya adalah nelayan serta di tambah fasilitas yang memadai hasil tangkapan ikan Kecamatan Ketapang menduduki posisi terendah setelah Kecamatan Pangarengan sebesar 1393 ton. Sedangkan pada kecamatan lainnya yang berada di sekitar pesisir pantai meskipun fasilitas tidak begitu memadai seperti yang ada di Kecamatan Ketapang, namun hasil tangkapan ikan lebih baik. Sehingga perbedaan inilah yang mendasari agar penelitian ini untuk dilakukan.

Perikanan merupakan salah satu SDA (Sumber Daya Alam) yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya (Danuri,2009).Pendapatan merupakan hal yang pokok bagi perekonomian keluarga hal inilah yang menjadikan motivasi masyarakat untuk bekerja memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya pada umumnya nelayan yang mempunyai modal besar mereka mempunyai perahu, fasilitas alat tangkap serta awak kapal dalam melakukan penangkapan ikan di tengah laut. Namun, hasil yang di miliki oleh nelayan tersebut tidak semuanya menjadi pendapatan baginya akan tetapi masih di bagi oleh potongan gaji buruh serta pengeluaran- pengeluaran lainnya sehingga pendapatan bersihnya menjadi penghasilan baginya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomer 72 tahun 2014 yang di sahkan oleh Gubernur Jawa Timur.Disebutkan UMK tertinggi ditempati Kota Surabaya sebesar Rp 2.710.000 dan terendah Kabupaten Magetan sebesar Rp 1.150.000, sedangkan UMK di Kabupaten Sampang Sebesar Rp. 1.231.650.Kabupaten Sampang UMK mencapai RP.1.231.650.Dari patokan tersebut nelayan Kabupaten Sampang berhak mendapatkan UMK sebesar Rp.1.231.650 (Pergub Nomor 72 tahun 2015).Patokan nilai UMK ini pada dasarnya dapat dijadikan acuan dalam penentuan upah buruh nelayan.Tetapi, hal ini berbeda dengan penerapan dilapangan.Tenaga kerja nelayan memiliki tenaga kerja yang bervariasi tergantung besaran yang di butuhkan berkisar antara 5-10 tenaga

kerja. Sedangkan dalam pemberian upah sering kali dilakukan setiap mendapatkan hasil tangkapan (survey lapangan). Hasil penangkapan itu sendiri menjadi acuan tersendiri dalam pemberian upah bagi buruh nelayan.

Diasumsikan apabila pendapatan nelayan lebih tinggi dari UMK maka pendapatan nelayan tersebut dapat tergolong sejahtera. Sebaliknya apabila pendapatan nelayan lebih kecil dari UMK maka pendapatan nelayan tersebut tergolong kurang sejahtera. Berdasarkan data diatas menunjukkan hasil penangkapan ikan di Kecamatan Ketapang sebesar 1.393 ton. Ini merupakan hasil capaian terendah di antara Kecamatan lainnya yang terdapat di Kabupaten Sampang, Sehingga dengan hasil penangkapan ikan yang kecil menyebabkan pendapatan nelayan di Kecamatan Ketapang berada di bawah UMK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nelayan yang berada di Kecamatan Ketapang kurang sejahtera.

Tujuan pembangunan perikanan di Indonesia ini pada prinsipnya memiliki dua sasaran pokok yaitu menaikkan produksi dan meningkatkan pendapatan pada sektor perikanan. Hal ini sejalan dengan upaya memperbaiki taraf hidup nelayan dan meningkatkan produksi perikanan nasional yang secara langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi oleh faktor modal kerja, pengalaman kerja yang dimiliki dan sebagainya (Sujarno.2008). Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya. Banyaknya tangkapan tercermin pula besar pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan konsumsi keluarga. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga atau kebutuhan fisik minimum (KFM) sangat ditentukan oleh pendapatan yang diterima.

Para usaha nelayan melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan demi kebutuhan hidup. Untuk pelaksanaannya diperlukan beberapa perlengkapan dan dipengaruhi oleh banyak faktor guna mendukung keberhasilan kegiatan. Menurut (Salim 1999), faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha nelayan meliputi sektor sosial dan ekonomi yang terdiri dari besarnya modal, jumlah tenaga kerja, pengalaman kerja, teknologi. Dengan demikian pendapatan nelayan berdasarkan besar kecilnya volume tangkapan, masih terdapat beberapa faktor yang lain yang ikut menentukannya yaitu faktor sosial dan ekonomi selain diatas.

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan berjalan lambat, karena kebijakan pembangunan lebih berorientasi kepada pengembangan kegiatan di daratan dibandingkan di kawasan pesisir dan lautan. Namun pada tahun kedepan ini Pemerintah sudah memprioritaskan untuk memajukan Kawasan Pesisir dan Lautan yang diambilkan dari anggaran subsidi bahan bakar minyak.

Upaya yang dilakukan dalam kaitannya dengan rencana kebijaksanaan pembangunan sektor pertanian, khususnya sub sektor perikanan, bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan baik untuk memenuhi pangan. Gizi dan bahan baku industri dalam negeri serta ekspor hasil perikanan.
2. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan nelayan,
3. Memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha dalam menunjang pembangunan daerah,

4. Meningkatkan pembinaan kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan hidup.

Dengan kenyataan tersebut maka sudah sewajarnya apabila potensi sumberdaya perikanan yang ada dikembangkan penangkapannya, untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memelihara dan menjaga kelestarian sumberdaya perikanan disamping memperhatikan faktor-faktor yang menunjang perolehan produksi usaha nelayan tersebut. Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Desa Ketapang yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah memiliki etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan berperilaku konsumtif (Kusnadi, 2009:39).

Tabel 1.3

**Indeks Perkembangan Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten
Sampang Atas Dasar Harga konstan Tahun 2010- 2014**

TAHUN	NILAI PDRB (juta RP)
2010	602,672
2011	639,628
2012	680,294
2013	743,858
2014	803,267

Sumber: *BPS Kabupaten Sampang*, 2015

Berdasarkan Tabel 1.3 indeks perkembangan sub sektor perikanan Kabupaten Sampang mengalami kenaikan jika dilihat dari nilainya. Seperti pada tahun 2013 sub sektor perikanan menyumbang sebesar Rp 743,858 juta rupiahmeningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun terakhir yaitu tahun 2014 nilai PDRB sub sektor perikanan sebesar Rp 803,267 juta rupiah.Pada tabel di atas terlihat nilai subsektor perikan terus mengalami kenaikan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan menurut Sujarno (2008) meliputi faktor sosial dan ekonomi yang terdiri dari besarnya biaya, jumlah perahu, jumlah tenaga kerja, jarak tempuh, dan pengalaman. Beberapa masalah hasil tangkapan yang juga mempengaruhi pendapatan yang diperoleh nelayan menurut Daryanto (2007) adalah tingginya harga bahan bakar, sumberdaya yang terkuras dan harga ikan sebagai *output* dalam perikanan tangkap.

Faktor lain yang mempengaruhi hasil tangkapan dan pendapatan nelayan di Kecamatan Ketapang yaitu cuaca. Nelayan tangkap di Kecamatan Ketapang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam di laut yang merupakan tempat mereka mencari penghasilan.Cuaca buruk yang terjadi setiap musim hujan, mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan nelayan, bahkan tidak sedikit pula nelayan yang beralih profesi karena kondisi laut yang tidak memungkinkan untuk melaut.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengamati dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas seperti pendapatan, modal, dan tenaga kerja, hal tersebut dikarenakan keinginan untuk

mengetahui bahwa apakah dari ke dua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut adalah :

1.4.1. Bagi Penulis

Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang pengembangan potensi pendapatan nelayan di kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

1.4.2. Bagi Pemerintah

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Ketapang kabupaten Sampang.

1.4.3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Nelayan.